**JURNAL ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL “HUMANITAS” FISIP UNPAS, VOL. 7, NOMOR 2, SEPTEMBER 2025**

**MODAL SOSIAL DALAM PROGRAM PENINGKATAN KESIAPSIAGAAN BENCANA DI KAMPUNG PELANGI KELURAHAN DAGO KOTA BANDUNG**

Uga Pratama Gunawan**1**, Umi Hani**2**

[uga.pratama@unpas.ac.id](mailto:uga.pratama@unpas.ac.id) , [umi.hani@unpas.ac.id](mailto:umi.hani@unpas.ac.id)

1-2 Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pasundan

***ABSTRAK***

Bencana sering kali mengganggu kehidupan normal masyarakat dan menimbulkan dampak negatif yang luas, sehingga memerlukan upaya penanggulangan, penyelamatan, dan pemulihan yang sistematis. Kesiapsiagaan bencana menjadi aspek penting dalam upaya mengurangi kerentanan masyarakat sekaligus mempercepat proses pemulihan pascabencana. Salah satu faktor yang berperan besar dalam membangun ketahanan masyarakat adalah modal sosial, yang mencakup hubungan, jaringan, dan kepercayaan antaranggota komunitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi serta merumuskan strategi pengembangan modal sosial dalam upaya peningkatan kesiapsiagaan bencana di Kampung Pelangi, Kelurahan Dago, Kota Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan telaah dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kampung Pelangi memiliki modal sosial yang relatif baik, ditunjukkan melalui aspek bonding capital (ikatan solidaritas dan kedekatan antarwarga), bridging capital (kerja sama lintas kelompok dan komunitas), serta linking capital (hubungan dengan pihak eksternal seperti pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat). Berdasarkan temuan tersebut, strategi peningkatan kesiapsiagaan bencana diarahkan pada penguatan kapasitas masyarakat melalui kegiatan edukasi, simulasi, dan pelatihan kebencanaan yang melibatkan seluruh elemen warga. Selain itu, pengembangan jaringan kemitraan dengan lembaga terkait serta pemanfaatan media komunikasi lokal juga menjadi kunci dalam memperluas akses informasi dan dukungan. Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan modal sosial berperan vital dalam membangun komunitas yang lebih tangguh menghadapi bencana. Model strategi yang dihasilkan dapat dijadikan acuan bagi wilayah lain dengan karakteristik serupa.

***KATA KUNCI****:* Modal Sosial, Pemberdayaan, Kesiapsiagaan Bencana

***ABSTRACT***

*Disasters often disrupt the normal life of communities and generate widespread negative impacts, thereby requiring systematic efforts of mitigation, rescue, and recovery. Disaster preparedness is a crucial aspect in reducing community vulnerability while also accelerating the post-disaster recovery process. One of the key factors contributing to the development of community resilience is social capital, which encompasses relationships, networks, and trust among community members. This study aims to identify and formulate strategies for developing social capital to enhance disaster preparedness in Kampung Pelangi, Dago Subdistrict, Bandung City. The research employed a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and document analysis. The findings reveal that Kampung Pelangi possesses relatively strong social capital, reflected in the aspects of bonding capital (solidarity and closeness among residents), bridging capital (collaboration across groups and communities), and linking capital (connections with external parties such as government agencies and non-governmental organizations). Based on these findings, the strategies to strengthen disaster preparedness are directed toward enhancing community capacity through educational activities, disaster simulations, and training that engage all residents. Furthermore, developing partnership networks with relevant institutions and utilizing local communication media are also essential to broaden access to information and support. This study highlights that strengthening social capital plays a vital role in building more resilient communities in the face of disasters. The proposed strategic model can serve as a reference for other regions with similar characteristics.*

***KEYWORDS:*** *Social Capital, Empowerment, Disaster Preparedness*

# PENDAHULUAN

Bencana kebakaran di Indonesia merupakan salah satu jenis bencana yang sering terjadi dan dapat menimbulkan dampak yang sangat merugikan baik secara sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Kebakaran di Indonesia terjadi dalam berbagai skala, mulai dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) hingga kebakaran bangunan atau permukiman. Kebakaran, baik itu kebakaran hutan, lahan, maupun permukiman, menjadi salah satu bencana yang memerlukan perhatian serius di Indonesia.

Penanggulangan kebakaran memerlukan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk mengurangi risiko, meningkatkan kesiapsiagaan, dan mempercepat proses pemulihan pasca-bencana. Upaya pencegahan dan edukasi mengenai bahaya kebakaran serta pentingnya menjaga kelestarian alam perlu terus digalakkan untuk mengurangi dampak yang lebih besar.

Mitigasi kebakaran di Indonesia memerlukan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Pencegahan kebakaran, kesiapsiagaan yang matang, pemulihan yang cepat, serta kolaborasi yang efektif adalah kunci dalam mengurangi dampak bencana kebakaran. Pemberdayaan masyarakat dan penguatan kapasitas daerah yang rawan kebakaran harus menjadi prioritas dalam pembangunan mitigasi bencana kebakaran jangka panjang.

Tujuan dari adanya pengembangan program dengan pemberdayaan masyarakat ini bertujuan untuk mengentaskan akar masalah yang ada, yakni kemiskinan. Pemaknaan dari sebuah proses Empowerment (Pemberdayaan) bukan hanya sekedar Peningkatan Kapasitas atau Keterampilan semata, namun sebuah proses Pemberdayaan dapat dimaknai sebagai sebuah proses “Pemberian Kekuatan” bagi seseorang, baik individu, kelompok, maupun masyarakat sehingga mereka dapat memecahkan masalahnya dan lepas atau merdeka dari kondisi yang mengekangnya. Aspek Sosial dan Ekonomi adalah salah satu faktor penting bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, dapat diambil sebuah hipotesis bahwa ketika “Masyarakat yang tidak berfungsi sosial akan memiliki hambatan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya karena mereka tidak berdaya”.

Keberfungsian Sosial sendiri berkaitan dengan tiga hal yakni Kemampuan Seseorang Dalam Memenuhi Kebutuhan Dasarnya; Kemampuan Seseorang Dalam Melaksanakan Tugas dan Peran Sosialnya Sesuai Dengan Tuntutan Lingkungan; Kemampuan Seseorang Dalam Memecahkan Masalah. Sebelum melakukan sebuah “Pemberdayaan Masyarakat”, sangat penting untuk dapat menemukenali letak permasalahan yang ada berkaitan dengan keberfungsian sosial tersebut. “Pemberdayaan Masyarakat” hadir untuk menjawab tantangan tersebut, bagaimana dalam proses ini Masyarakat dikembalikan fungsi sosialnya sehingga mereka dapat berdaya dan kemudian mampu memenuhi kebutuhannya. Ketika masyarakat dapat berfungsi secara sosial, diharapkan masyarakat akan mampu memenuhi berbagai level dalam tingkatan keberdayaan masyarakat tersebut. Dapat dilihat teori mengenai tingkat keberdayaan masyarakat oleh Susiladiharti (dalam Huraerah, 2011:90) terdapat lima tingkat dalam keberdayaan masyarakat yakni :

1. Terpenuhinya Kebutuhan Dasar
2. Penguasaan akses terhadap system sumber
3. Kesadaran penuh akan kekuatan, kelemahan, dan potensi yang dimiliki
4. Kemampuan untuk berpartisipasi didalam masyarakat
5. Kemampuan mengontrol diri dan lingkungan.

Usaha pemberdayaan yang dilakukan kepada masyarakat haruslah memperhatikan banyak hal, seperti kesiapan masyaakat dan bagaimana kondisi sosial kultural masyarakat yang akan menjadi objek pemberdayaan. Maka dari itu, salah satu hal yang patut diperhatikan dalam sebuah usaha pemberdayaan masyarakat adalah modal sosial yang ada pada masyarakat itu sendiri.

Modal sosial (Social Capital) adalah sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat dalam bentuk norma-norma atau nilai-nilai yang memfasilitasi dan membangun kerja sama melalui jaringan interaksi dan komunikasi yang harmonis dan kondusif. Modal sosial ini kemudian akan memberikan kekuatan kepada masyarakat untuk bersama meraih tujuan bersama.

Modal sosial berkaitan dengan sumber-sumber daya, aktual atau virtual (tersirat) yang berkembang pada diri seorang individu atau sekelompok individu karena kemampuan untuk memiliki suatu jaringan yang dapat bertahan lama dalam hubungan-hubungan yang lebih kurang telah diinstitusikan berdasarkan pengetahuan dan pengenalan timbal balik (Hasbullah, 2006). modal sosial adalah kemampuan masyarakat untuk bekerja sama, demi menjadi tujuan tujuan bersama, di dalam berbagai kelompok dan organisasi (Coleman, 1999).

Terdapat tiga unsur dalam modal sosial yakni kepercayaan, jaringan sosial, serta nilai dan norma. Ketiga unsur kemudian akan membentuk Modal sosial yang merupakan suatu komitmen dari setiap individu untuk saling terbuka, saling percaya, memberikan kewenangan bagi setiap orang yang dipilihnya untuk berperan sesuai dengan tanggung jawabnya. Sarana ini menghasilkan rasa kebersamaan, kesetiakawanan, dan sekaligus tanggung jawab akan kemajuan bersama.

Kampung Pelangi adalah sebuah kawasan yang terletak di Kota Bandung, tepatnya di bantaran sungai Cikapundung yang membatasi Kelurahan Dago dan Kelurahan Ciumbuleuit. Kampung ini terkenal karena konsep desain rumah dan lingkungan yang dihiasi dengan warna-warna cerah yang membuatnya terlihat sangat menarik dan Instagramable. Konsep ini terinspirasi oleh Kampung Warna-Warni Jodipan di Malang yang sebelumnya sukses menjadi daya tarik wisata. Kampung Pelangi menjadi salah satu destinasi wisata yang cukup populer di Bandung, terutama bagi mereka yang gemar berburu foto di tempat-tempat unik dan penuh warna.

Kampung Pelangi awalnya merupakan sebuah kawasan pemukiman yang cukup sederhana dan tidak memiliki daya tarik khusus, terlebih kampung ini dikenal dengan kondisi geografisnya yang sangat curam serta padatnya pemukiman di wilayah tersebut. Namun, sejak 2017, Kampung Pelangi mulai disulap oleh warga dan pemerintah setempat menjadi kawasan yang lebih berwarna dan menarik. Proyek ini diawali dengan program revitalisasi kawasan permukiman yang bertujuan untuk memperbaiki kondisi lingkungan dan memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat.

Proyek ini mendapat dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk pemerintah kota Bandung dan warga sekitar yang berpartisipasi aktif dalam mengecat rumah dan area sekitar dengan warna-warni cerah. Kampung ini akhirnya menjadi sebuah ikon baru di Bandung yang menarik perhatian wisatawan lokal dan mancanegara.

Kampung Pelangi kini menjadi salah satu tujuan wisata baru di Bandung, terutama bagi wisatawan yang suka berfoto di tempat-tempat yang unik dan menarik. Konsep "kampung warna-warni" ini berhasil menarik perhatian banyak pengunjung yang datang untuk menikmati keindahan visual dan suasana yang berbeda dari tempat lain di Bandung.

Selain sebagai objek wisata, Kampung Pelangi juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat. Melalui wisata, warga kampung mendapatkan penghasilan tambahan dari penjualan makanan, suvenir, dan jasa wisata lainnya. Selain itu, proyek ini juga memberi rasa bangga dan kepemilikan kepada warga

Selain estetikanya, Kampung Pelangi juga berfungsi sebagai contoh program revitalisasi lingkungan yang menggabungkan keindahan dengan keberlanjutan. Konsep ini juga diharapkan dapat menjadi model bagi kampung-kampung lain di Indonesia dalam hal pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan lingkungan yang lebih baik.

Meskipun menjadi tempat wisata yang populer, infrastruktur di sekitar Kampung Pelangi terkadang kurang memadai, seperti jalan yang sempit dan akses transportasi yang terbatas. Oleh karena itu, masih diperlukan peningkatan fasilitas agar dapat menampung lebih banyak wisatawan.

Kampung Pelangi Bandung adalah contoh sukses dari upaya kreatif untuk mengubah kawasan pemukiman menjadi destinasi wisata yang menarik. Melalui revitalisasi dan pewarnaan bangunan, Kampung Pelangi tidak hanya menarik perhatian wisatawan, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar. Kampung ini kini menjadi simbol kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, dan sektor pariwisata dalam menciptakan lingkungan yang lebih indah dan berkelanjutan.

Terlepas dari berbagai keunggulannya, kampung pelangi menyimpan sebuah permasalahan besar, yakni padatnya pemukiman masyarakat serta terjalnya medan di wilayah tersebut yang membuat masyarakat terancam jika terjadi bencana. Hal ini menjadi perhatian bagi pemerintah serta warga setempat dikarenakan mereka sadar bahwasannya bencana dapat terjadi kapan saja, apalagi Kota Bandung dikenal sebagai wilayah rawan bencana seperti longsor, banjir, serta gempa bumi wilayah mereka yang padat juga menyimpan potensi bencana kebakaran yang dapat terjadi kapan saja, sehingga perlu usaha mitigasi bencana.

Kebakaran yang tidak terkendali dapat merusak infrastruktur penting, seperti jalan, jembatan, bangunan, dan fasilitas umum. Kerusakan infrastruktur ini menghambat proses pemulihan setelah bencana dan mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Kerugian ekonomi akibat kebakaran sangat besar, baik langsung (kerusakan rumah, lahan, dan fasilitas umum) maupun tidak langsung (gangguan kegiatan bisnis, produksi pertanian yang terbakar, atau penurunan pariwisata). Dalam beberapa kasus, kebakaran besar bisa menyebabkan kerugian miliaran rupiah.

Sebagai wilayah yang dicanangkan sebagai destinasi wisata serta padat penduduk, maka perlu adanya upaya peningkatan kemampuan masyarakat dalam hal mitigasi bencana kebakaran di wilayah kampung pelangi yang berada di daerah Kelurahan Dago.

Pemberdayaan Masyarakat pada prinsipnya memerlukan adanya keterlibatan dan komitmen dari masyarakat selaku sasaran perubahan. Maka demikian, dalam sebuah kegiatan pemberdayaan masyarakat sangat perlu dilakukan identifikasi atas modal sosial dari masyarakat yang menjadi sasaran agar tujuan dari pemberdayaan yang dilakukan dapat berjalan optimal.

Bencana merupakan ancaman nyata bagi masyarakat yang tinggal di wilayah rawan, termasuk kawasan perkotaan padat seperti Kota Bandung. Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandung (2023) menunjukkan bahwa dalam kurun lima tahun terakhir, wilayah Dago dan sekitarnya mengalami peningkatan intensitas bencana hidrometeorologi seperti banjir, longsor, dan angin kencang. Kampung Pelangi RW 12, Kelurahan Dago, sebagai salah satu wilayah yang terletak di lereng perbukitan dengan kepadatan permukiman tinggi, menghadapi kerentanan yang semakin kompleks terhadap ancaman bencana. Hal ini diperburuk dengan kondisi sosial ekonomi warga yang beragam dan keterbatasan infrastruktur siaga.

Dalam menghadapi risiko bencana, pendekatan berbasis komunitas semakin diakui sebagai strategi yang efektif dan berkelanjutan (UNDRR, 2015). Salah satu aspek kunci dalam pendekatan ini adalah penguatan modal sosial, yaitu jaringan, norma, dan kepercayaan yang memungkinkan masyarakat bertindak secara kolektif untuk mencapai tujuan bersama (Putnam, 2000). Modal sosial menjadi penting karena ia berperan sebagai penggerak solidaritas, fasilitator pertukaran informasi, dan sumber dukungan dalam kondisi darurat (Aldrich, 2012).

Sejumlah studi menunjukkan bahwa komunitas dengan tingkat modal sosial yang tinggi cenderung memiliki kemampuan bertahan dan pulih lebih cepat dari bencana. Misalnya, penelitian oleh Aldrich dan Meyer (2015) menunjukkan bahwa relasi sosial yang kuat dapat menjadi penentu utama keberhasilan komunitas dalam merespons dan bangkit pasca-bencana, bahkan lebih signifikan dibandingkan bantuan material. Sementara itu, penelitian di konteks Indonesia oleh Hidayati et al. (2019) di Yogyakarta dan Kurniawan et al. (2021) di Lombok menunjukkan bahwa program kesiapsiagaan yang mengintegrasikan modal sosial dengan pelatihan teknis terbukti lebih efektif dalam mengurangi risiko korban jiwa dan kerusakan.

Namun demikian, banyak komunitas urban rentan yang masih mengandalkan reaksi spontan berbasis hubungan sosial yang belum terorganisir. Kampung Pelangi RW 12 adalah contoh dari komunitas yang memiliki ikatan sosial kuat, namun belum memiliki sistem kesiapsiagaan yang terstruktur dan berkelanjutan. Kegiatan gotong royong, ronda malam, dan solidaritas warga saat banjir menjadi bukti bahwa modal sosial eksis secara laten, tetapi belum dikelola secara strategis dalam kerangka kebencanaan. Selain itu, keterlibatan warga dalam proses perencanaan penanggulangan bencana masih terbatas, dan hubungan dengan lembaga eksternal seperti BPBD, LSM, maupun universitas masih bersifat insidental.

Penelitian ini menjadi penting untuk menjawab kebutuhan akan strategi pengembangan modal sosial yang tidak hanya memperkuat ikatan antarwarga (bonding), tetapi juga membangun jejaring lintas kelompok (bridging) dan memperluas konektivitas dengan aktor eksternal (linking) dalam rangka menciptakan sistem kesiapsiagaan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan merancang strategi penguatan modal sosial secara kontekstual di Kampung Pelangi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan untuk perumusan kebijakan dan program-program siaga bencana berbasis komunitas di kawasan urban lain yang memiliki karakteristik serupa.

Berdasarkan Latar Belakang tersebut, peneliti Tertarik Untuk Melakukan Penelitian Berkenaan Modal Sosial Dalam Program Peningkatan Kesiapsiagaan Bencana Di Kampung Pelangi Kelurahan Dago Kota Bandung.

**METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian dilakukan dengan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Metode analisa deskriptif merupakan penelitian dan analisis terhadap masalah yang sedang terjadi dengan harapan menghasilkan penemuan sesuai dengan tujuan penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

Teknik Wawancara sebagaimana dikemukakan oleh Creswell (2009:178) terbagi menjadi dua bagian yaitu unstructured dan semistructured interviews. Dari kedua jenis wawancara ini dilakukan secara tatap muka.

Observasi. Menurut Bungin (2005: 134), “observasi atau pengamatan adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian, data-data penelitian tersebut dapat diamati peneliti.

Data Sekunder adalah berupa informasi yang tidak diperoleh dari lapangan langsung, melalui: Studi Dokumemtasi. Studi Dokumen menurut Alwasilah (2003: 157), berpendapat bahwa “dokumen berperan sebagai sumber pelengkap dan pemerkaya bagi informasi yang diperoleh lewat interview atau observasi”.

Studi Kepustakaan. Studi Kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan cara membaca buku dan karya tulis yang bersifat ilmiah yang dapat mendukung penelitian.

Data yang berhasil diperoleh kemudian ditabulasi dan dianalisa secara deskriptif kualitatif, lalu disajikan dalam bentuk naratif sesuai dengan masalah yang sedang dibahas. Teknik Analisis yang digunakan adalah :

1. Reduksi data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar, yang muncul dari catatan-catatan lapangan. Reduksi data berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung”. Miles dan Huberman (dalam Suprayogo dan Tobroni, 2001:193)

1. Penyajian Data

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart serta teks yang bersifat naratif. Dalam melakukan display data, selain dengan teks naratif, juga dapat dalam bentuk grafik, matrik, network, dan chart (Sugiyono, 2005: 95).

1. Penarikan Kesimpulan

Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2005: 99), menjelaskan “penarikan kesimpulan adalah kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya”.

**PEMBAHASAN**

1. Modal Sosial

Kampung Pelangi RW 12, yang terletak di Kelurahan Dago, Kota Bandung, merupakan salah satu kawasan padat penduduk yang menyimpan potensi kerentanan terhadap bencana alam, khususnya tanah longsor dan banjir. Kondisi geografis yang berbukit, ditambah dengan pola aliran air hujan dari dataran lebih tinggi, menjadikan kawasan ini rentan, terutama pada musim penghujan. Namun, di balik kerentanannya, tersimpan kekuatan sosial yang bernilai: modal sosial masyarakat.

Modal sosial adalah kekuatan yang lahir dari hubungan sosial antarmasyarakat yang ditandai oleh adanya kepercayaan, norma, dan jaringan yang saling mengikat. Di Kampung Pelangi, modal sosial bukan hanya bagian dari kehidupan sehari-hari, tetapi juga menjadi pilar penting dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan bencana. Ketika ancaman bencana datang, kekuatan masyarakat tidak hanya bergantung pada keberadaan alat peringatan dini atau bantuan pemerintah, melainkan juga pada solidaritas, gotong royong, dan kepedulian sosial yang telah tertanam lama.

Modal sosial masyarakat Kampung Pelangi RW 12, Kelurahan Dago, Kota Bandung menunjukkan struktur dan dinamika yang khas. Dalam konteks kesiapsiagaan bencana, modal sosial menjadi faktor pendorong utama terbentuknya mekanisme lokal untuk tanggap darurat, penyebaran informasi, dan solidaritas dalam menghadapi risiko. Untuk memahami kekuatan dan kelemahan modal sosial di Kampung Pelangi, perlu dianalisis berdasarkan tiga aspek utama: bonding, bridging, dan linking.

* + - 1. Bonding

Modal sosial bonding, yang mencerminkan kekuatan ikatan sosial internal dalam komunitas yang homogen, menjadi fondasi paling kuat dalam struktur sosial masyarakat Kampung Pelangi. Ikatan ini dibentuk melalui sejarah hidup berdampingan, keterikatan emosional antartetangga, serta kebiasaan saling membantu yang sudah mengakar lama. Dalam situasi bencana, modal bonding ini terbukti menjadi respons awal dan utama sebelum intervensi formal dari pemerintah tiba. Misalnya, ketika terjadi banjir lokal akibat curah hujan tinggi, warga secara spontan mengevakuasi kelompok rentan seperti anak-anak dan lansia ke tempat yang lebih aman. Beberapa rumah warga di dataran lebih tinggi secara sukarela dijadikan tempat pengungsian sementara. Tindakan-tindakan seperti ini muncul bukan karena perintah, melainkan karena rasa tanggung jawab sosial yang tinggi dan budaya gotong royong yang masih hidup.

Rutinitas sosial seperti kerja bakti, pengajian RT, arisan ibu-ibu, dan ronda malam juga berperan penting dalam memperkuat kepercayaan sosial (social trust) dan jaringan komunikasi informal. Informasi terkait bencana, cuaca ekstrem, ataupun kondisi lingkungan biasanya lebih cepat tersebar melalui grup WhatsApp RT atau obrolan warung dibanding melalui kanal resmi. Ini menunjukkan bahwa struktur sosial informal lebih tanggap dan adaptif dalam menyikapi tanda-tanda awal bencana. Dengan kata lain, bonding capital bukan hanya bersifat simbolik, tetapi juga operasional: ia mampu menggerakkan warga untuk bertindak secara kolektif dan cepat.

Namun demikian, kekuatan bonding ini juga menyimpan potensi eksklusivitas. Relasi yang sangat dekat dalam lingkar sosial terbatas cenderung kurang membuka ruang bagi warga baru, kelompok pendatang, penyewa rumah kontrakan, atau individu-individu yang tidak aktif dalam kegiatan sosial. Akibatnya, terdapat sekelompok warga yang tidak terintegrasi dalam sistem sosial siaga komunitas, sehingga rentan terlambat menerima informasi atau tidak tercakup dalam evakuasi darurat. Hal serupa terjadi pada kelompok rentan lain seperti lansia tunggal dan difabel, yang seringkali tidak masuk dalam prioritas perhatian spontan karena kurangnya keterlibatan dalam aktivitas harian warga. Ini menandakan bahwa bonding capital yang terlalu tertutup bisa menimbulkan eksklusi sosial dalam konteks siaga bencana.

Oleh karena itu, penting untuk mendorong penguatan bonding capital yang lebih inklusif dan terstruktur. Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah memperkenalkan mekanisme “penyambutan warga baru” di setiap RT, yang tidak hanya mengenalkan sistem sosial lingkungan, tetapi juga menyampaikan informasi penting terkait jalur evakuasi, titik kumpul, dan kontak darurat. Di sisi lain, perlu dilakukan pemetaan aset sosial warga secara partisipatif, agar setiap individu dalam komunitas dikenali perannya saat krisis—misalnya, siapa yang memiliki kendaraan, siapa yang dapat membantu evakuasi, dan siapa yang memerlukan bantuan khusus. Strategi lainnya adalah menyisipkan unsur edukasi kebencanaan dalam kegiatan sosial rutin seperti pengajian atau arisan, agar isu siaga bencana menjadi bagian alami dari budaya warga, bukan hanya wacana dari luar.

Dengan demikian, bonding capital di Kampung Pelangi dapat dimaksimalkan bukan hanya sebagai kekuatan sosial yang menggerakkan aksi cepat dalam kondisi darurat, tetapi juga sebagai struktur solidaritas sosial yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Ketika semua warga merasa menjadi bagian dari jaringan sosial siaga, maka kapasitas kolektif untuk bertahan, pulih, dan beradaptasi terhadap bencana akan meningkat secara signifikan.

* + - 1. Bridging

Bridging capital, yang merujuk pada hubungan lintas kelompok sosial dalam komunitas, menjadi aspek penting dalam menciptakan kesiapsiagaan bencana yang adil dan menyeluruh. Di Kampung Pelangi, bentuk bridging sudah mulai tampak dalam keterlibatan beberapa kelompok sosial seperti Karang Taruna, kelompok pengajian ibu-ibu, dan PKK. Namun, keterlibatan mereka dalam konteks kebencanaan masih sporadis dan bersifat sektoral. Artinya, aktivitas mereka cenderung tidak terkoordinasi secara menyeluruh dalam kerangka sistem siaga bencana komunitas. Misalnya, Karang Taruna aktif dalam kerja bakti atau kampanye lingkungan, tetapi belum difungsikan secara sistematis sebagai unit pelaksana simulasi bencana. Hal serupa terjadi pada PKK yang kerap menjadi tulang punggung dapur umum saat bencana, namun belum dilibatkan dalam perencanaan evakuasi atau penyusunan rencana kontinjensi komunitas.

Rendahnya integrasi lintas kelompok ini menyebabkan protokol kesiapsiagaan bersifat tidak merata. Beberapa RT lebih siap karena memiliki kader muda aktif, sementara RT lain cenderung pasif karena tidak terhubung dengan jaringan kegiatan lintas kelompok. Padahal, bridging capital memiliki potensi besar untuk memperluas jangkauan informasi, memperkuat koordinasi horizontal, serta mempertemukan kekuatan yang tersebar dalam kelompok-kelompok sosial berbeda. Tanpa penguatan hubungan antar kelompok ini, sistem siaga komunitas akan timpang dan berisiko tidak inklusif, terutama terhadap kelompok sosial yang selama ini tidak terlalu aktif atau tidak memiliki representasi dalam pengambilan keputusan.

Penguatan bridging capital dapat dilakukan melalui pembentukan Forum Siaga Bencana RW, yang dirancang sebagai ruang pertemuan antar perwakilan RT dan kelompok sosial di Kampung Pelangi. Forum ini tidak hanya berfungsi sebagai ruang koordinasi, tetapi juga sebagai sarana untuk menyusun strategi kesiapsiagaan bersama yang inklusif dan akuntabel. Agar tidak menjadi forum formalitas belaka, keanggotaan forum harus terbuka bagi pemuda, perempuan, dan warga biasa—bukan hanya elite struktural. Di samping itu, forum ini bisa menyelenggarakan kegiatan kolaboratif yang bersifat membangun keakraban lintas kelompok, seperti Festival Kampung Siaga, yang memadukan unsur edukasi, kesenian, dan kompetisi evakuasi antar RT. Dengan pendekatan partisipatif dan menyenangkan, bridging capital bisa diperkuat tanpa menimbulkan resistensi atau rasa canggung antarkelompok.

Salah satu langkah penting lainnya adalah mengembangkan mekanisme pertukaran pengetahuan antar RT. Setiap RT mungkin memiliki praktik baik yang tidak diketahui oleh RT lain, seperti sistem peringatan dini berbasis kentongan, struktur kelompok tanggap darurat, atau kanal evakuasi mandiri. Tanpa ruang berbagi, inovasi-inovasi tersebut hanya menjadi praktik terisolasi. Oleh karena itu, pertemuan dua bulanan antar ketua RT, dokumentasi praktik baik yang dipajang di balai warga, atau sistem “RT magang” untuk pengurus baru dapat mempercepat replikasi inovasi horizontal secara organik. Kegiatan ini sekaligus memperkuat rasa kesetaraan dan memperluas jejaring sosial horizontal yang mempercepat respons saat bencana terjadi.

Dengan memperkuat bridging capital, Kampung Pelangi dapat memperluas partisipasi warga secara horizontal dan menciptakan kesiapsiagaan yang bersifat kolektif, lintas kelompok, dan menyeluruh. Hubungan sosial yang cair antar kelompok akan memperkaya perspektif, memperkuat jejaring, dan mengurangi kesenjangan informasi serta logistik saat terjadi krisis. Dalam konteks bencana yang berdampak luas dan lintas batas administratif, bridging capital menjadi jembatan strategis yang tak tergantikan.

* + - 1. Linking

Modal sosial linking, yang mengacu pada keterhubungan komunitas dengan aktor-aktor eksternal yang memiliki kewenangan dan sumber daya (seperti pemerintah, LSM, universitas, atau sektor swasta), merupakan elemen penting dalam membangun sistem kesiapsiagaan bencana yang komprehensif. Di Kampung Pelangi, keterhubungan ini belum terbangun secara sistematis. Relasi dengan lembaga formal masih bersifat sporadis dan cenderung bergantung pada tokoh tertentu seperti ketua RW atau tokoh agama yang memiliki koneksi pribadi dengan pihak luar. Akibatnya, informasi, pelatihan, atau bantuan teknis terkait kebencanaan tidak terdistribusi secara merata, serta cenderung tidak berkelanjutan.

Minimnya linking capital terlihat, misalnya, dari ketidakhadiran perwakilan warga Kampung Pelangi dalam forum Musrenbang Kelurahan saat pembahasan alokasi anggaran untuk program tanggap darurat. Warga juga belum terlibat dalam pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bandung, padahal pelatihan tersebut penting untuk meningkatkan kapasitas teknis dalam hal mitigasi dan evakuasi. Ketiadaan struktur formal penghubung antara komunitas dan institusi ini menyebabkan kesenjangan komunikasi vertikal dan berpotensi memperlemah posisi tawar komunitas dalam mengakses program dan sumber daya yang seharusnya dapat mereka manfaatkan.

Strategi penguatan linking capital dapat dimulai dengan menyusun Rencana Aksi Siaga Bencana RW, sebuah dokumen partisipatif yang memuat peta risiko, jalur evakuasi, aset komunitas, dan kebutuhan prioritas. Dokumen ini tidak hanya memperkuat konsolidasi internal warga, tetapi juga menjadi alat advokasi yang sah dan terukur saat diajukan ke kelurahan atau BPBD. Selanjutnya, penting bagi komunitas untuk mengembangkan kemitraan formal dengan universitas atau LSM yang bergerak di bidang kebencanaan. Namun, kemitraan ini harus dilakukan secara setara, berbasis nota kesepahaman (MoU), agar tidak bersifat top-down atau hanya menjadikan komunitas sebagai objek proyek.

Pelatihan bagi warga untuk memahami struktur kebijakan publik dan anggaran pembangunan juga menjadi langkah strategis. Dengan bekal ini, warga dapat mengadvokasi kepentingannya dalam forum-forum perencanaan pembangunan, serta menuntut perlindungan yang layak dari pemerintah. Selain itu, Kampung Pelangi juga dapat mengidentifikasi potensi dukungan dari sektor swasta melalui program CSR, baik dalam bentuk penyediaan alat evakuasi, pengeras suara peringatan dini, atau dukungan logistik saat tanggap darurat. Namun untuk menjamin transparansi, komunitas perlu memiliki tim pengelola relasi eksternal yang bertugas menyaring dan mengelola kerja sama sesuai dengan kebutuhan warga.

Penguatan linking capital bukan hanya soal akses terhadap sumber daya eksternal, tetapi juga menyangkut peningkatan kapasitas komunitas dalam berkomunikasi, bernegosiasi, dan menyampaikan suara mereka secara kolektif dan sah. Dalam konteks Kampung Pelangi, membangun relasi strategis dan adil dengan pihak luar akan memperkuat posisi komunitas dalam sistem kebencanaan yang lebih luas. Komunitas yang memiliki linking capital yang baik tidak hanya mampu bertahan saat bencana terjadi, tetapi juga mampu mempengaruhi arah kebijakan dan sumber daya untuk membangun ketahanan jangka panjang.

**Tabel 3.1.   
Rekapitulasi Kondisi Modal Sosial di Kampung Pelangi**

| **Aspek Modal Sosial** | **Kekuatan Utama** | **Tantangan Utama** | **Peluang Tindakan** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Bonding** | Solidaritas kuat antarwarga | Eksklusivitas sosial | Inklusivitas berbasis pemetaan sosial |
| **Bridging** | Keterlibatan Karang Taruna dan PKK | Masih sektoral dan parsial | Kegiatan lintas kelompok dan forum inklusif |
| **Linking** | Ada hubungan tokoh ke luar komunitas | Minim kelembagaan & keberlanjutan | Forum RW & advokasi kebijakan lokal |

Modal sosial menjadi fondasi kesiapsiagaan masyarakat Kampung Pelangi, tetapi kekuatannya akan meningkat jika dimobilisasi secara terstruktur, inklusif, dan terhubung dengan sistem formal penanggulangan bencana.

Kehidupan sosial di kampung ini menunjukkan bentuk-bentuk nyata dari modal sosial. Ikatan antarwarga (bonding capital) terlihat dari kebiasaan warga saling membantu ketika ada yang sakit, kesulitan ekonomi, hingga bencana kecil seperti saluran mampet akibat hujan deras. Jembatan antar kelompok (bridging capital) muncul melalui kolaborasi antara kelompok pemuda Karang Taruna, ibu-ibu PKK, dan relawan lingkungan yang menginisiasi kegiatan bersih kampung, pemetaan jalur evakuasi, dan simulasi bencana secara mandiri. Sementara itu, hubungan vertikal dengan institusi formal (linking capital) juga terbentuk melalui peran aktif Ketua RW dan tokoh masyarakat yang menjalin komunikasi rutin dengan Kelurahan Dago, BPBD Kota Bandung, dan pihak universitas.

Ketika hujan deras mengguyur, masyarakat Kampung Pelangi tidak tinggal diam. Warga saling mengingatkan melalui grup WhatsApp, membantu keluarga lanjut usia untuk mengevakuasi diri, serta menyediakan tempat berlindung sementara di rumah-rumah yang lebih aman. Semua ini dilakukan bukan karena perintah formal, melainkan berlandaskan kesadaran kolektif dan rasa memiliki terhadap sesama.

Namun demikian, kekuatan ini tak lepas dari tantangan. Kepercayaan sosial yang tinggi antarwarga kadang tidak diikuti dengan jembatan kuat ke institusi formal. Informasi kebencanaan dari pemerintah kerap terlambat atau tidak sampai ke masyarakat bawah. Selain itu, masih terdapat kesenjangan komunikasi antara kelompok warga lama dan pendatang, atau antara generasi tua dan muda, yang kadang menghambat pengambilan keputusan bersama.

Meski begitu, potensi penguatan modal sosial sangat besar. Dengan dukungan yang tepat, seperti pelatihan kebencanaan berbasis masyarakat, forum dialog antar kelompok, dan fasilitasi program berbasis komunitas dari pemerintah atau LSM, modal sosial di Kampung Pelangi dapat dikembangkan menjadi sistem ketangguhan bencana yang kuat dan mandiri. Inisiatif lokal bisa diperkuat dengan jejaring eksternal, tanpa menghilangkan semangat gotong royong yang menjadi akar kekuatan warga.

Kisah Kampung Pelangi membuktikan bahwa kesiapsiagaan bencana bukan semata urusan teknologi atau dana besar. Ia adalah buah dari hubungan sosial yang sehat, keterlibatan warga secara aktif, dan kepercayaan satu sama lain. Dalam konteks ini, modal sosial bukan hanya alat bantu, tetapi fondasi utama dalam membangun ketangguhan masyarakat terhadap bencana.

2. Kesiapsiagaan Bencana di Kampung Pelangi

Kesiapsiagaan bencana adalah serangkaian upaya sistematis yang dilakukan untuk meminimalkan risiko dan dampak bencana melalui perencanaan, edukasi, pelatihan, dan penguatan kapasitas komunitas. Dalam konteks perkotaan seperti Bandung yang rentan terhadap banjir, longsor, dan gempa bumi, kesiapsiagaan menjadi kebutuhan mendesak.

Bagi masyarakat Kampung Pelangi RW 12 di Kelurahan Dago, kesiapsiagaan bencana bukan sekadar isu teknis, melainkan bagian dari strategi bertahan hidup. Kawasan ini berada di wilayah berbukit dengan sistem drainase terbatas, membuatnya sangat rentan terhadap longsor dan limpasan air hujan. Kesiapsiagaan menjadi mekanisme utama dalam melindungi nyawa, aset, dan keberlangsungan komunitas.

Kampung Pelangi RW 12, Kelurahan Dago, merupakan salah satu kawasan pemukiman padat di Kota Bandung yang terletak di daerah berbukit. Topografi kawasan tersebut menyebabkan aliran permukaan air hujan yang cukup tinggi, dan membuat wilayah ini rentan terhadap bencana alam, terutama banjir dan tanah longsor. Kerentanan ini diperparah oleh sistem drainase yang belum optimal, serta padatnya bangunan yang mengurangi ruang resapan air.

Dalam menghadapi risiko tersebut, masyarakat Kampung Pelangi menunjukkan berbagai bentuk kesiapsiagaan berbasis komunitas. Kesiapsiagaan bencana di sini tidak sepenuhnya bergantung pada intervensi teknis dari pemerintah, melainkan dibentuk dari kesadaran kolektif, solidaritas sosial, serta pengalaman lokal menghadapi bencana. Hal ini sejalan dengan konsep Community-Based Disaster Risk Reduction (CBDRR) yang menekankan pada peran aktif masyarakat dalam mengelola risiko bencana secara partisipatif (Maskrey, 2011).

Salah satu bentuk kesiapsiagaan yang dilakukan adalah pembentukan jaringan komunikasi darurat berbasis RT/RW, khususnya melalui aplikasi pesan instan seperti WhatsApp. Jaringan ini digunakan untuk menyebarkan informasi cuaca, peringatan dini, dan koordinasi saat hujan lebat turun. Selain itu, kegiatan edukasi kebencanaan juga dilakukan oleh tokoh masyarakat dan kelompok warga seperti Karang Taruna dan PKK. Beberapa kegiatan yang rutin dilakukan antara lain sosialisasi jalur evakuasi, kerja bakti membersihkan saluran air, serta pelatihan tanggap darurat bagi warga.

Upaya-upaya tersebut mencerminkan pendekatan bottom-up, di mana masyarakat menjadi aktor utama dalam proses mitigasi. Menurut Wisner et al. (2004), masyarakat lokal merupakan pihak pertama yang merasakan dampak bencana dan karenanya harus dilibatkan dalam setiap tahap manajemen risiko bencana, mulai dari identifikasi risiko hingga tindakan respons dan pemulihan. Pendekatan ini juga memungkinkan penyusunan strategi yang lebih kontekstual, sesuai dengan kondisi sosial dan geografis setempat.

Namun demikian, kesiapsiagaan di Kampung Pelangi masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah kurangnya pelatihan berkala dan keterbatasan akses terhadap informasi resmi dari BPBD atau BMKG. Selain itu, masih ada kesenjangan dalam hal partisipasi masyarakat, di mana sebagian warga—khususnya kelompok usia lanjut atau masyarakat baru yang belum lama bermukim—belum sepenuhnya terlibat dalam kegiatan kebencanaan. Kesenjangan ini menunjukkan pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan komunitas dan penyelarasan informasi antara institusi formal dan masyarakat.

Menurut UNDRR (2015), kesiapsiagaan yang efektif memerlukan koordinasi lintas sektor, pemetaan risiko yang akurat, sistem peringatan dini yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat, serta penguatan kapasitas lokal melalui pelatihan dan simulasi. Oleh karena itu, penguatan kesiapsiagaan di Kampung Pelangi harus diarahkan pada peningkatan kolaborasi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan pihak eksternal seperti universitas dan LSM.

Secara keseluruhan, Kampung Pelangi memberikan gambaran bahwa kesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat dapat tumbuh dan berkembang meskipun dalam keterbatasan. Melalui inisiatif lokal, solidaritas sosial, dan pengetahuan kolektif, masyarakat mampu membangun sistem tanggap darurat yang relevan dengan kondisi lokal. Namun, untuk menjadikan kesiapsiagaan ini berkelanjutan dan inklusif, dibutuhkan dukungan yang lebih sistemik, termasuk pengakuan dan integrasi dalam kebijakan pemerintah kota.

Kesiapsiagaan bencana di Kampung Pelangi melibatkan berbagai aktor lokal, antara lain:

1. Warga masyarakat sebagai pelaku utama yang merasakan langsung dampak bencana.
2. Ketua RW, RT, dan tokoh masyarakat yang mengorganisasi dan memfasilitasi kegiatan komunitas.
3. Karang Taruna, PKK, dan relawan lokal, yang bergerak dalam edukasi dan kerja lapangan.
4. Pemerintah kelurahan dan BPBD Kota Bandung, sebagai penyedia informasi dan fasilitator program kesiapsiagaan.
5. LSM, perguruan tinggi, dan relawan eksternal, yang kadang hadir melalui program kemitraan atau pendampingan komunitas.

Kampung Pelangi berada di lereng kawasan Dago, Bandung Utara, yang topografinya berbukit dan padat pemukiman. Wilayah ini berada di jalur aliran air dari dataran tinggi dan mengalami limpasan air cukup besar saat hujan deras. Masalah yang umum dihadapi meliputi:

1. Drainase tersumbat dan tidak mampu menampung debit air hujan.
2. Lahan pemukiman yang padat dan tidak dirancang dengan prinsip mitigasi.
3. Beberapa rumah berada di lereng curam yang rawan longsor.

Kesiapsiagaan dalam konteks ini mencakup pengenalan risiko, pemetaan daerah rawan, pengorganisasian warga untuk evakuasi, hingga penyiapan jalur darurat dan titik kumpul. Kesiapsiagaan bencana di Kampung Pelangi menjadi sangat krusial pada Musim penghujan antara Oktober hingga Maret, saat curah hujan tinggi dapat memicu banjir dan longsor. Saat terjadi perubahan tata guna lahan di kawasan hulu, seperti pembangunan yang meningkatkan aliran permukaan.

Pasca peringatan dini dari BMKG atau BPBD, ketika masyarakat perlu melakukan antisipasi langsung. Waktu respons warga terhadap peringatan dini sangat menentukan dampak bencana yang terjadi. Tanpa kesiapsiagaan, evakuasi bisa terlambat dan korban jiwa lebih mungkin terjadi.

Berdasarkan temuan dan observasi di Kampung Pelangi, bentuk kesiapsiagaan bencana mencakup:

1. Pemetaan wilayah rawan secara partisipatif bersama warga dan tokoh masyarakat.
2. Sosialisasi risiko dan pelatihan evakuasi oleh perangkat RW atau kerja sama dengan BPBD.
3. Pembuatan grup komunikasi darurat, seperti WhatsApp RW yang aktif saat hujan ekstrem.
4. Simulasi evakuasi tahunan yang melibatkan warga dari berbagai usia.
5. Penyediaan perlengkapan darurat sederhana seperti megafon, lampu cadangan, dan pelampung buatan warga.

Meski berbasis lokal, kegiatan-kegiatan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak pasif dalam menghadapi ancaman, melainkan aktif membangun mekanisme proteksi mandiri.

Kesiapsiagaan bencana yang efektif tidak dapat dibangun hanya dengan pendekatan teknis atau struktural semata. Dalam konteks komunitas padat seperti Kampung Pelangi, kesiapsiagaan yang berkelanjutan justru bertumpu pada pengelolaan dan integrasi modal sosial masyarakat yang meliputi bonding, bridging, dan linking capital. Ketiga bentuk modal sosial ini—jika dikembangkan secara sinergis dan berorientasi inklusif—akan membentuk fondasi sosial yang mampu memperkuat respons cepat, memperluas jangkauan informasi, serta memastikan seluruh elemen warga terlibat aktif dalam siklus kebencanaan.

Hasil analisis menunjukkan bahwa modal sosial bonding di Kampung Pelangi sangat kuat dan aktif. Hubungan antarwarga terjalin erat, ditandai oleh kepedulian, kebersamaan, serta reaksi spontan dalam situasi krisis. Namun, tanpa integrasi dengan bentuk modal sosial lainnya, bonding cenderung bersifat eksklusif. Inilah pentingnya kehadiran bridging capital, yang berperan memperluas jejaring sosial komunitas lintas kelompok—baik antar RT, lintas generasi, gender, dan status sosial. Bridging menjadi perekat yang menjembatani perbedaan dan memastikan bahwa kelompok yang sebelumnya kurang terlibat (misalnya, warga penyewa, difabel, atau pemuda) ikut serta dalam sistem kesiapsiagaan.

Namun, kesiapsiagaan yang hanya mengandalkan kekuatan internal memiliki batas. Oleh sebab itu, linking capital perlu diperkuat agar komunitas tidak hanya mampu bertindak mandiri, tetapi juga memiliki akses terhadap pengetahuan, teknologi, serta dukungan kebijakan dan anggaran dari aktor eksternal seperti pemerintah, universitas, dan NGO. Integrasi linking ke dalam sistem kesiapsiagaan komunitas memungkinkan Kampung Pelangi untuk tampil sebagai subjek aktif yang menyuarakan kebutuhannya dalam forum pembangunan dan turut membentuk arah kebijakan penanggulangan risiko bencana di wilayahnya.

Integrasi ketiga bentuk modal sosial ini tidak akan berhasil tanpa mekanisme koordinasi yang solid dan partisipasi warga yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pembentukan struktur pengelolaan siaga bencana di tingkat RW menjadi penting—misalnya melalui Forum Kampung Siaga Bencana yang inklusif, transparan, dan memiliki peran koordinatif lintas kelompok dan lintas sektor. Forum ini berfungsi sebagai pusat pembelajaran bersama, wadah penyusunan protokol siaga, dan penghubung strategis antara warga dan institusi eksternal. Dalam forum ini, berbagai kekuatan sosial warga—dari pengalaman ibu-ibu PKK, keterampilan pemuda, jejaring RT, hingga relasi tokoh agama—dapat diorkestrasi dalam satu sistem siaga yang utuh.

Pada akhirnya, kesiapsiagaan bencana berbasis komunitas tidak hanya soal mampu menyelamatkan diri, tetapi juga mampu menyelamatkan sesama. Kampung Pelangi memiliki potensi besar untuk mewujudkan sistem tersebut melalui kekuatan sosial yang telah lama terbentuk. Dengan penguatan modal sosial yang terintegrasi, warga tidak hanya menjadi penonton dari program kesiapsiagaan yang dibawa dari luar, melainkan menjadi aktor utama dalam merancang, melaksanakan, dan menjaga sistem perlindungan kolektifnya sendiri.

**KESIMPULAN**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengembangan modal sosial dalam peningkatan kesiapsiagaan bencana di Kampung Pelangi RW 12, Kelurahan Dago, Kota Bandung. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif dan studi lapangan, ditemukan bahwa ketiga bentuk modal sosial—bonding, bridging, dan linking capital—memiliki peran penting namun tantangan yang berbeda dalam konteks kesiapsiagaan komunitas terhadap bencana.

Pertama, bonding capital atau ikatan sosial antarwarga terbukti sangat kuat dan menjadi kekuatan utama dalam respons spontan saat terjadi bencana. Modal ini ditandai oleh kebiasaan gotong royong, kepedulian sosial, dan komunikasi informal yang efektif. Namun, kekuatan ini masih bersifat eksklusif dan belum sepenuhnya menjangkau kelompok rentan atau warga baru.

Kedua, bridging capital di Kampung Pelangi menunjukkan potensi untuk memperkuat koordinasi antar kelompok sosial. Keterlibatan Karang Taruna, PKK, dan kelompok keagamaan sudah terbentuk, tetapi belum terintegrasi dalam sistem siaga yang menyeluruh. Keterbatasan partisipasi dan koordinasi lintas kelompok masih menjadi hambatan.

Ketiga, linking capital di wilayah ini relatif lemah dan belum berkembang secara sistemik. Hubungan dengan aktor eksternal seperti BPBD, kelurahan, universitas, dan LSM masih bergantung pada relasi informal dan personal. Ini menyebabkan rendahnya akses terhadap pelatihan, bantuan logistik, dan advokasi kebijakan yang berpihak pada komunitas.

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa modal sosial di Kampung Pelangi memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai fondasi sistem kesiapsiagaan bencana berbasis komunitas. Namun, ketiga aspek modal sosial tersebut perlu dikelola dan diintegrasikan secara strategis agar mampu membentuk kesiapsiagaan yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis partisipasi warga.

**DAFTAR PUSTAKA**

Abu. Huraerah. 2011. Pengorganisasian Dan Pengembangan Masyarakat, Model Dan Strategi Pembangunan Berbasis Kerakyatan. Bandung. Humaniara

Aldrich, D. P. (2012). Building resilience: Social capital in post-disaster recovery. University of Chicago Press.

Aldrich, D. P., & Meyer, M. A. (2015). Social capital and community resilience. American Behavioral Scientist, 59(2), 254–269. https://doi.org/10.1177/0002764214550299

Alwasilah, A Chaedar. 2003. Pokoknya Kualitatif: Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif. Jakarta: Dunia Pustaka Jaya

Bungin, Burhan. 2005. Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta: Prenadamedia.

BPBD Kota Bandung. (2023). Laporan Tahunan Penanggulangan Bencana Kota Bandung. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandung.

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.

Dynes, R. R. (2006). Social capital: Dealing with community emergencies. *Homeland Security Affairs*, 2(2), 1–26.

Field, J. 2010. Modal Sosial. Kreasi Wacana, Bantul. (Diterjemahkan Oleh Nurhadi).

Fukuyama, F. 2002. Trust. Kebajikan Sosial dan Penciptaan Kemakmuran. Penerbit Qalam, Yogjakarta. (Diterjemahkan Oleh Ruslani).

Harjanto, Hari Setiawan. 2009. “ Partisipasi Masyarakat dan Modal Sosial Dalam Pembangunan”. Vol 14 No.03 Tahun 2009

Hasbullah, J. 2006. Sosial Kapital: Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia. Mr. United States, Jakarta.

Hidayati, D., Pramitasari, A., & Subekti, H. (2019). Modal sosial dan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana di Yogyakarta. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 8(1), 47–56.

Kurniawan, R., Anshari, M. Z., & Wulandari, I. (2021). Peran modal sosial dalam kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana gempa bumi di Kabupaten Lombok Barat. Jurnal Pengabdian Masyarakat Kebencanaan, 3(2), 91–102.

Kusumastuti, Ayu. 2015. “Modal Sosial dan Mekanisme Adaptasi Masyarakat Pedesaan dalam Pengelolaan dan Pembangunan Insfrastruktur.”

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Bencana Daerah.

Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Simon & Schuster.

Putnam, RD. 1993. “The Prosperous Community: Social Capital and Public Life”. The American Prospect 3:35-42.

Putnam, RD. 1995. “Bowling Alone: America’s Declining Social Capital”. Journal of Democracy 6(1):65-78

Ritzer, George. (Ed). 2005. Encyclopedia of Social Theory. Vol.II. California: Sage Publication

Sirovatka Thomas dan Mares Petr. 2008. “Social Exclusion and Forms of Social Capital”. Czech Sociological Review Vol 44 (3): 531-555.

UNDRR. (2015). *Sendai framework for disaster risk reduction 2015–2030*. United Nations Office for Disaster Risk Reduction. <https://www.undrr.org/publication/sendai-framework-disaster-risk-reduction-2015-2030>

Woolcock, M., & Narayan, D. (2000). Social capital: Implications for development theory, research, and policy. *The World Bank Research Observer*, 15(2), 225–249. <https://doi.org/10.1093/wbro/15.2.225>

Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.